2024

RENCANA AKSI

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
PENEGAKAN HUKUM LHK

2024

Rencana Aksi Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK

Tim Penyusun

Pengarah :
Dr. Dwi Januanto Nugroho, S.Hut, M.B.A

Penanggungjawab :
Suwarti, S.H

Koordinator :
Yuli Yanti, S.E

Anggota :
Nurul Hofiah, S.Hut

KATA PENGANTAR

Rencana Aksi Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban yang memuat tujuan, sasaran dan jadwal untuk satu tahun ke depan. Rencana Aksi ini juga dijadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Aksi ini merupakan Road Map (Peta Jalan) sebagai upaya dan pencapaian keberhasilan dalam melaksanakan tugas yang diemban sebagai unit kerja yang mempunyai peran dalam dukungan manajemen berdasarkan Rencana Kerja Sekretariat Ditjen Gakkum LHK Tahun 2024. Rencana Aksi ini memuat perencanaan dan prognosis per triwulan di tahun 2024 pada kegiatan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum LHK.

Rencana Aksi Tahun 2024 ini diharapkan dapat mengoptimalkan peran Sekretariat Ditjen Gakkum LHK dalam mendukung peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Ditjen Gakkum LHK.

Jakarta, Desember 2023
Sekretaris Jenderal,

Dwi Januanto Nugroho
NIP. 19760108 200312 1 005

BAB I. PENDAHULUAN

1. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Rencana Aksi Penetapan Kinerja TA 2024 adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan dan Kehutanan. Tujuan dari Rencana Aksi ini adalah menyediakan peta jalan implementasi kegiatan lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

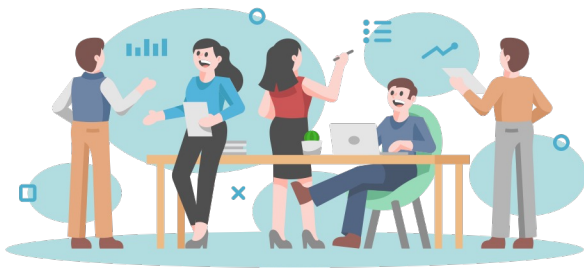

2. LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Ditjen Penegakan Hukum LHK dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.975/MENLHK/SETJEN/REN.2/8/2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1263/MENLHK/SETJEN/REN.0/11/2023 Tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024;
4. Keputusan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.53/PHLHK/SETPHLHK/REN.4.6/B/12/2023 Tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024;
5. Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. /SET.10/KKOTL/REN.0/12/2023 tentang Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK Tahun 2024.

BAB II. RENCANA AKSI

Sesuai dengan perjanjian kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan HukumLingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2024 dan Rencana Kerja TA 2024, telah disampaikan bahwa sasaran kegiatan kinerja Setditjen PHLHK adalah meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien lingkup Ditjen PHLHK. Hal ini dapat dilihat dari indikator kinerja kegiatan pada tabel berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien lingkup Ditjen PHLHK	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK	80 Poin
	Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK	Level 4
	Laporan keuangan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK yang tertib dan akuntabel	1 Dokumen

Perencanaan target dari masing-masing IKK dan output per triwulan seperti tercantum pada lampiran.

BAB III. PENUTUP

Rencana Aksi Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 searah dengan pelaksanaan Rencana Kerja Setditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2024 perlu dilaksanakan dan dikawal bersama seiring Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial dengan memperhatikan protokol Kesehatan. Rencana Aksi ini berpedoman kepada Dokumen Rencana Kerja Setditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2024 yang telah memasukkan Indikator Kinerja yang ditetapkan dan disusun berdasarkan evaluasi, arahan, dan masukan untuk pembangunan satu tahun mendatang, dan titik awal pelaksanaan RPJMN, Revisi Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Revisi Rencana Strategis Direktorat Jenderal GAKKUM KLHK Tahun 2020-2024. Dengan demikian, Rencana Aksi Tahun 2023 ini menjadi media yang melengkapi Rencana Kerja Setditjen PHLHK Tahun 2024 untuk memandu setiap gerak dan langkah Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya, seluruh intervensi (regulasi dan anggaran) dari seluruh unit kerja diharapkan dapat dipastikan kemanfaatannya didalam mendukung secara langsung pemenuhan kinerja.

LAMPIRAN

Rencana Target Kegiatan Pendukung Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kegiatan Pendukung	Satuan Output	Target Output	Anggaran (Rp)	Target Output Bulanan											
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
1	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien lingkup Ditjen PHLHK	1. Nilai SAKIP Ditjen Penegakan Hukum LHK 2. Level Maturitas SPIP Ditjen Penegakan Hukum LHK 3. Laporan keuangan Ditjen Penegakan Hukum LHK yang tertib dan akuntabel	EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal															
			962. Layanan Umum	1	Layanan	21,851,067,000												
			051. Layanan PEHKT															
			1. Perencanaan Program dan Anggaran				2%	5%	10%	15%	25%	35%	45%	55%	75%	80%	90%	100%
			2. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Pengelolaan Data, dan Informasi				2%	5%	10%	15%	25%	35%	45%	55%	75%	80%	90%	100%
			3. Pengelolan Teknologi Sistem Informasi				2%	5%	10%	15%	25%	35%	45%	55%	75%	80%	90%	100%
			4. Pengelola Hubungan Masyarakat				2%	5%	10%	15%	25%	35%	45%	55%	75%	80%	90%	100%
			5. Pengelolaan Kerja Sama Teknis				2%	5%	10%	15%	25%	35%	45%	55%	75%	80%	90%	100%
			6. Penyusun Rancangan Peraturan, Pertimbangan, dan Advokasi Hukum				2%	5%	10%	15%	25%	35%	45%	55%	75%	80%	90%	100%
			052. Layanan KKOTL															
			1. Administrasi Kepegawaian				2%	5%	10%	15%	25%	35%	45%	55%	75%	80%	90%	100%
			2. Pengelolaan Jabatan Fungsional				2%	5%	10%	15%	25%	35%	45%	55%	75%	80%	90%	100%
			3. Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi				2%	5%	10%	15%	25%	35%	45%	55%	75%	80%	90%	100%
			4. Pengembangan Kompetensi Pegawai, Manajemen Karir, dan Manajemen Kinerja Pegawai				2%	5%	10%	15%	25%	35%	45%	55%	75%	80%	90%	100%
			5. Administrasi Keuangan dan Tindak Lanjut Temuan				2%	5%	10%	15%	25%	35%	45%	55%	75%	80%	90%	100%
			6. Perlengkapan dan Pengelolaan BMN				2%	5%	10%	15%	25%	35%	45%	55%	75%	80%	90%	100%
			7. Layanan pimpinan dan MCU				2%	5%	10%	15%	25%	35%	45%	55%	75%	80%	90%	100%
			054. Layanan Dukungan Penyelenggaraan Tusi Unit															
			1. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Ditjen Gakkum LHK				2%	5%	10%	15%	25%	35%	45%	55%	75%	80%	90%	100%
			2. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Setditjen Gakkum LHK				2%	5%	10%	15%	25%	35%	45%	55%	75%	80%	90%	100%
			3. Penyelenggaraan SPIP Setditjen Gakkum LHK				2%	5%	10%	15%	25%	35%	45%	55%	75%	80%	90%	100%
			4. Pengelolaan Kearsipan dan Tata Naskah Dinas				2%	5%	10%	15%	25%	35%	45%	55%	75%	80%	90%	100%
			5. Pengarusutamaan Gender (PUG) Ditjen PHLHK				2%	5%	10%	15%	25%	35%	45%	55%	75%	80%	90%	100%
			6. Pengelolaan Perpustakaan Ditjen PHLHK				2%	5%	10%	15%	25%	35%	45%	55%	75%	80%	90%	100%
			7. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian				2%	5%	10%	15%	25%	35%	45%	55%	75%	80%	90%	100%
			8. Implementasi Eco Office Ditjen PHLHK				2%	5%	10%	15%	25%	35%	45%	55%	75%	80%	90%	100%
			994. Layanan perkantoran	1	Layanan	50,629,808,000												
			1. Gaji dan Tunjangan				2%	5%	10%	15%	25%	35%	45%	55%	75%	80%	90%	100%
			2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Setditjen PHLHK				2%	5%	10%	15%	25%	35%	45%	55%	75%	80%	90%	100%
			EBB. Layanan Sarana dan Prasarana Internal															
			951. Layanan Sarana Internal	1	Unit, m2, paket	19,508,054,000												
			1. Pengadaan kendaraan bermotor				2%	5%	10%	15%	25%	35%	45%	55%	75%	80%	90%	100%
			2. Pengadaan peralatan pengolah data				2%	5%	10%	15%	25%	35%	45%	55%	75%	80%	90%	100%
			3. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran				2%	5%	10%	15%	25%	35%	45%	55%	75%	80%	90%	100%
			4.Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan				2%	5%	10%	15%	25%	35%	45%	55%	75%	80%	90%	100%
		Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker Kantor Pusat Ditjen PHLHK		95,07	Poin		2,57	10,79	21,05	38,48	54,60	60,04	73,84	75,35	77,82	79,32	83,52	95,07

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Dwi Januanto Nugroho, S.Hut, M.B.A

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2023

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM	Dr. Dwi Januanto Nugroho, S.Hut, M.B.A
NIP 19660711 199203 1 018	NIP. 19760108 200312 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024
1	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya ditjen penegakan hukum LHK	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	80 Poin
			Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4 Level
			Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Tertib dan Akuntabel	1 Laporan
			Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker Kantor Pusat Ditjen PHLHK	95,07 Poin

Klasifikasi Rincian Output (KRO) / Rincian Output (RO)

Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Target RO	Anggaran
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	1 Layanan	Rp21.851.067.000,00
	994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	Rp50.629.808.000,00
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	1 Unit	Rp19.508.054.000,00
Total Anggaran			**Rp91.988.929.000,00**

Jakarta, 29 Desember 2023

Pihak Kedua,

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,

Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Dwi Januanto Nugroho, S.Hut, M.B.A
NIP. 19760108 200312 1 005